

Responsifitas Gender Pada Fasilitas Umum di Kota Serang

Listyaningsih, Arenawati dan Ismanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultang Ageng Tirtayasa
listyaningsih@untirta.ac.id

Abstract

Public facilities provided by the government must be utilized by men, women, children, the elderly and the disabled. But in reality we often find that public facilities cannot be utilized. In the city of Serang there are still public facilities that are not child friendly, not friendly to the elderly, not friendly to the disabled, not even friendly to women or can be said to be gender responsive. This study aims to determine how much the level of gender responsiveness in public facilities in the city of Serang. To measure the level of gender responsiveness of these public facilities, the researcher draws from the opinion of Setiawati (2013), namely universal utilization, safety, security, convenience, gender equity for basic needs, environmental friendly. This research is quantitative research with descriptive method. The population of this research are the people whose use public facilities in Serang City. The objects of this research are Bus Terminals, Sidewalks and Bridge Crossing People (JPO), Markets, Shelters and City Parks. The sampling technique used is quota where each object consists of 30 respondents so that the total respondents in this study were 180 people. The results showed that the level of gender responsiveness in public facilities in Serang City was 2.09 moderate categories. Based on the research object, the level of gender responsiveness on sidewalks is 2.31 (medium), terminal is 2.13 (medium), City Park 2.5 (medium), Market 2.19 (medium) JPO is 1.53 (low) and Stop at 1.88 (low). From these results it can be concluded that gender responsiveness in public facilities in Serang City is moderate.

Keywords: Gender, Facilities, Public, Responsiveness

Abstrak

Fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah harus dapat digunakan oleh pria, wanita, anak-anak, orang tua, dan orang cacat. Namun dalam kenyataannya kita sering menemukan bahwa fasilitas publik tidak dapat digunakan. Di Kota Serang masih ada fasilitas umum yang tidak ramah anak, tidak ramah kepada orang tua, tidak ramah bagi penyandang cacat, bahkan tidak ramah bagi perempuan atau dapat dikatakan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat respons gender pada fasilitas publik di Kota Serang. Untuk mengukur tingkat responsif gender dari fasilitas publik ini, peneliti mengambil dari pendapat Setiawati (2013), yaitu pemanfaatan universal, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan gender untuk kebutuhan dasar, ramah lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan fasilitas umum di Kota Serang. Objek penelitian ini adalah Terminal Bus, Trotoar dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Pasar, Shelter dan Taman Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah kuota dimana setiap objek terdiri dari 30 responden sehingga total responden dalam penelitian ini adalah 180 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah 2,09 kategori sedang. Berdasarkan objek penelitian, tingkat respons gender di trotoar adalah 2,31 (sedang), terminal 2,13 (sedang), Taman Kota 2,5 (sedang), Pasar 2,19 (sedang) JPO 1,53 (rendah) dan Berhenti di 1,88 (rendah)). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa responsif gender fasilitas publik di Kota Serang adalah moderat.

Kata kunci: Gender, Fasilitas, Publik, Responsif

PENDAHULUAN

Pemenuhan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi sebuah keniscayaan pada perkembangan pembangunan di Indonesia. Mengingat *basic function of the government* sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan....”. Maka berdasarkan amanat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, tidak hanya pada golongan atau kelompok tertentu. Penghidupan dan kesejahteraan seluruh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah baik pusat dan daerah sudah harus memikirkan bagaimana mewujudkan pemerintahan yang tanggap pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan pergeseran paradigma bahwa pembangunan ditujukan dan harus bisa

dirasakan oleh masyarakat, maka menarik perhatian pemerintah untuk terus berinovasi. Salah satu inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas adalah bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan akan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati bersama, baik itu oleh masyarakat laki-laki, perempuan, anak, lansia dan kaum difabel yang serba memiliki keterbatasan.

Kota Serang merupakan salah satu dari delapan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten. Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (dprd-serangkota.gp.id). Sama halnya seperti di kota lain, Pemerintah Kota Serang pun membangun fasilitas publik untuk kepentingan masyarakat. Fasilitas publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta untuk kepentingan umum oleh karena itu pembangunan fasilitas publik

memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk kebutuhan kaum perempuan, anak-anak, orang tua dan kaum disabilitas. Oleh karena itu pembangunan fasilitas publik sudah saatnya memperhatikan kebutuhan khusus dari laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang tua, agar fasilitas publik dapat bermanfaat secara maksimal.

Pembangunan di Kota Serang diarahkan untuk selalu berbasis pada Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Karena hal ini memang sudah menjadi *concern* pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga pada pembangunan fasilitas publik pun diarahkan pada pemenuhan hak anak dan gender. Pertanyaan mendasar yang selalu menyertai adalah apakah infrastruktur pada fasilitas publik yang dibangun sudah responsif gender atau belum?

Fasilitas publik seperti trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), toilet umum, pembatas jalan seharusnya juga responsif gender. Namun yang ditemui pada saat ini masih banyak terdapat fasilitas publik yang tidak

responsif gender. Seperti trotoar yang tinggi, tidak ada permukaan landai untuk pengguna kursi roda, tidak ada penanda untuk pejalan kaki yang buta, trotoar yang tinggi dan jembatan penyeberangan dengan anak tangga yang tinggi juga tidak responsif bagi perempuan dan anak. Begitu juga kesediaan toilet di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar perbandingan jumlahnya tidak responsif gender karena wanita menggunakan toilet lebih lama dari laki-laki, oleh karena itu jumlah toilet wanita harusnya lebih banyak. Kondisi-kondisi seperti menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Kota Serang masih belum responsif gender.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Gender

Handayani dan Sugiarti (dalam Arkaniyati, 2012: 10) mengatakan bahwa konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Masih dalam Arkaniyati (2012: 10) begitu pula yang dikemukakan oleh Mugniyah bahwa

konsep gender adalah perbedaan sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem nilai budaya dan struktur sosial. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu sehingga, dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Menurut Arkaniyati (2012: 11), "Kesetaraan gender (*gender equality*) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa

pembatasan oleh seperangkat *stereotype*, prasangka, dan peran gender yang kaku. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal".

Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender adalah; pertama, kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembanguana Kedua partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga kontrol, perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan. Keempat manfaat, pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

2. Patriarki dan Ruang

Bagi sebagian kaum feminis (feminis radikal), ketidakadilan gender yang selama ini terjadi cenderung terjadi karena adanya budaya patriarki dalam berbagai bidang kehidupan (Jones, 2010), sehingga diantara tujuan pengarusutamaan gender adalah menghapus budaya patriarki dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu juga dalam hal penataan ruang. Sebagian kaum feminis menganggap penataan ruang perkotaan selama ini telah didominasi oleh budaya patriarki sehingga penataan ruang kota selama ini kurang memikirkan keadilan gender. Sebagai mana dijelaskan oleh Cuthbert (2006) bahwasanya hampir seluruh struktur (ruang) kota telah dirumuskan berdasarkan pemikiran patriarki-kapitalis. Penentuan pola ruang, *zoning*, penentuan bentuk, lokasi, dan tipe kawasan permukiman, dan jaringan transportasi yang selama ini ada lahir dari nilai-nilai dan harapan dari dominasi kaum laki-laki.

3. Responsifitas Gender Pada Fasilitas Paublik

Dalam Riset *Gender Impact Assessment*, Puslitbang Sosial,

Ekonomi dan Lingkungan tahun 2013 yang dikutip oleh Setyawati, Baby Dipokusumo (2018) terdapat 4 prinsip gender infra struktur “ *Infrastructure for All*” adalah sebagai berikut :

1. *Universal utilization*, Dapat dimanfaatkan oleh perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya (Lansia, Difable, Anak-anak) sesuai dengan kebutuhan.
2. *Safety, Security, Convinience*, Memberikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna (misalnya: penerangan jalan, bebas banjir, desain bangunan yang aman, desain trotoar yang bebas halangan)
3. *Gender Equaty for Basic Needs*, Memberikan kesetaraan aksesibilitas terhadap layanan dasar laki-laki dan perempuan, Lansia, Difable, Anak-anak, *Safety, Security, Health (human needs)*
4. *Environmental Friendly*, dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan perempuan, laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus lainnya

Empat prinsip ini peneliti jadikan indikator untuk mengukur tingkat responsifitas pada fasilitas publik di Kota Serang.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis guna memperoleh data yang representatif, penelitian tentang tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik di Kota Serang ini menggunakan metode yang memungkinkan terkompilasinya aspirasi murni persepsi masyarakat tentang sejumlah hal yang menjadi fokus penelitian ini. Maka dari itu, metode survei dengan pendekatan kuantitatif digunakan guna mencapai tujuan tersebut. Survei dimaksud adalah aktivitas pengumpulan data primer secara langsung dari populasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang relevan. Sedangkan pendekatan kuantitatif diadopsi guna menentukan tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik di Kota Serang.

Sebagaimana lazimnya metode kuantitatif maka penelitian ini dilakukan pada populasi yang pada dasarnya merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atau objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005: 90). Dalam survei ini, populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Kota Serang berdasarkan data BPS terkini, yaitu sebanyak 643.205 jiwa (BPS, 2017).

Adapun besaran sampel (*sampling size*) ditentukan berdasarkan quota sampling di semua objek penelitian. Hal ini dilakukan karena mengingat keterbatasan peneliti yang tidak memiliki data berapa banyak pengguna fasilitas publik di Kota Serang yang memanfaatkan fasilitas public tersebut. Terdapat 6 objek penelitian dalam penelitian ini, Trotoar Jalan, JPO, Pasar, Halte, Terminal dan Taman Kota. Masing-masing objek terdiri dari 30 responden, sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 180 orang. Teknik sampling yang dilakukan adalah dengan incidental sampling. Analisis Data yang digunakan adalah analisis Data Kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus statistika.

Pengumpulan Data dilakukan dengan metode kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi . Pengukuran terhadap tingkat kepuasan

dan tingkat urgensi (prioritas) responsifitas gender pada fasilitas publik di Kota Serang menggunakan skala likert berjenis data ordinal dengan 4 (*empat*) opsi tingkatan, yaitu: Sangat Baik (4), Baik (3), Kurang Baik (2), Sangat kurang Baik (1)

Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan piranti lunak *Microsoft Excell*. Dengan memanfaatkan fasilitas piranti lunak tersebut, dikembangkan aplikasi sederhana untuk melakukan pengolahan data, antara lain proses: (i) *Coding*, (ii) *Editing*, dan (iii) *Tabulating*. Sedangkan analisis data dilakukan berdasarkan hasil *scoring* yang menggambarkan tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik di Kota Serang, dengan memberikan skor 1 untuk skor terendah dan 4 untuk skor tertinggi. Skor ini kemudian dikonversi sesuai dengan banyaknya pertanyaan dalam masing-masing indikator dan besaran nilai maksimal pada masing-masing indikator tersebut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan memanfaatkan beragam formula statistik deskriptif yang dilakukan guna mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan

yang telah dilakukan dengan melakukan klasifikasi data, penentuan nilai dan fungsi statistik, pembuatan grafik, diagram dan/ atau gambar, serta analisis terhadap ukuran-ukuran statistik seperti: ukuran pemusatan data (*mean, median, modus*), ukuran persebaran data (*range, standard deviation, variance*), dan ukuran lokasi dari persebaran / distribusi data (*quartile, desile, percentile*).

Tabel 3.3
Pedoman Interpretasi Hasil Skoring

No	Nilai Interval Skor Aktual	Interpretasi
1	1,00 - 2,00	Rendah
2	2,01 – 3,00	Sedang
3	3,01 – 4,00	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat responsifitas gender pada fasilitas umum dapat dilihat dari 4 indikator diantaranya adalah *universal utilization, Safety Security Convenience, Gender Equity for Basic Needs* dan *Environmental Friendly*. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan pada grafik berikut ini:

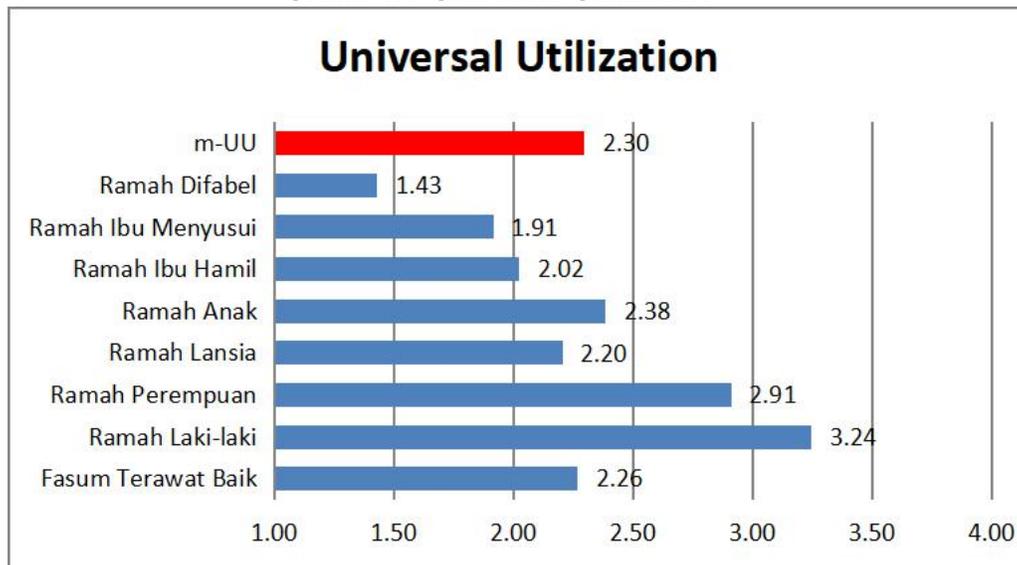
1. Indikator *Universal Utilization*

Indikator ini menggambarkan bagaimana fasilitas publik dapat

memberikan kemanfaatan dan dapat digunakan secara umum oleh masyarakat/ publik. *Universal utilization* dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya adalah kondisi Fasilitas publik, ramah bagi laki-laki, perempuan,

lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta apakah fasilitas publik tersebut juga ramah terhadap difabel. Hasil penelitian ini dapat diuraikan pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1 Universal Utilization



Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018

Grafik di atas menjelaskan bagaimana fasilitas umum dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat umum atau tidak. Secara umum, nilai rerata pada indikator ini sebesar 2,30 atau masuk kategori cukup baik. Terdapat pernyataan responden bahwa hampir semua fasilitas publik yang berada di Kota Serang merupakan fasilitas publik yang ramah terhadap laki-laki. Artinya bahwa, hampir semua laki-laki dapat

memanfaatkan fasilitas yang ada, kecuali pada fasilitas JPO yang rusak dan sudah banyak berlobang di wilayah Ciceri depan Carefour. Demikian juga dengan masyarakat dari kelompok perempuan, anak, lansia dan ibu hamil tidak semuanya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, meski untuk ibu hamil dan lansia masih memiliki kendala jika harus menggunakan JPO untuk menyeberang jalan.

Temuan lapangan selanjutnya adalah diperoleh informasi bahwa fasilitas publik di Kota Serang kurang ramah dengan dengan kelompok masyarakat Difabel dan tidak menyediakan fasilitas untuk ibu menyusui (ruang laktasi). Hal ini dibuktikan dengan penilaian yang diberikan responden sebesar 1,43 untuk ramah difabel (kurang baik) dan 1,91 untuk ramah ibu menyusui atau masuk ke dalam kategori cukup baik.

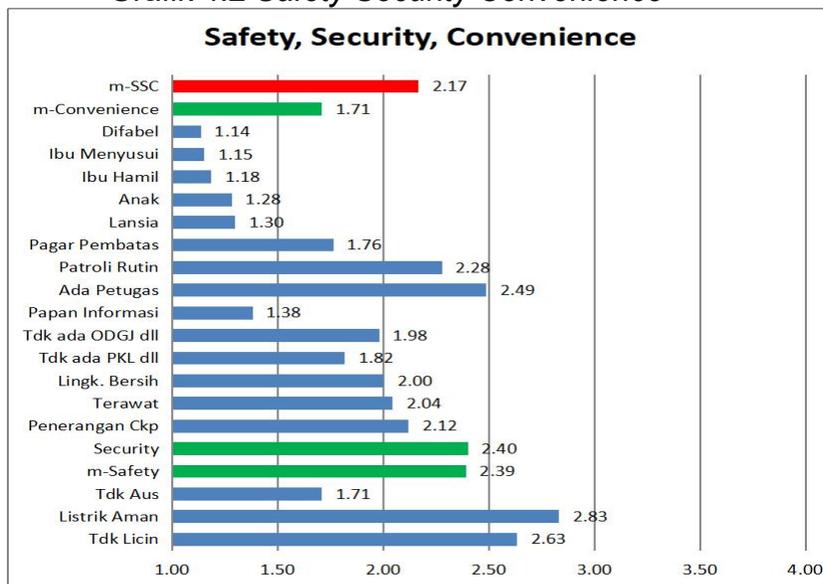
Fasilitas publik yang digunakan masyarakat di Kota Serang, berdasarkan jawaban responden diperoleh informasi bahwa fasilitas umum di Kota Serang kurang terawat dengan baik. dengan nilai sebesar 2,26

(cukup baik). Masih terdapat responden yang menjawab kurang terawat dengan baik karena masih banyak JPO yang berlubang dan sampah berserakan, kemudian trotoar yang banyak digunakan diluar fungsinya dan seterusnya.

Safety Security dan Convenience

Indikator ini akan menjelaskan apakah fasilitas publiks yang berada di Kota Serang memenuhi syarat keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas yaitu laki-laki, perempuan, anak, lansia dan difabel. Berdasarkan temuan lapangan maka dapat dipaparkan pada grafik berikut ini:

Grafik 4.2 *Safety Security Convenience*



Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018

Berdasarkan grafik di atas dapat diperoleh informasi bahwa secara umum fasilitas publik di Kota Serang mendapat penilaian sebesar 2,27 atau masuk kategori cukup baik. Bila penilaian dipisahkan maka nilai diantara sub indikator tersebut menjadi berbeda. Soal keselamatan fasilitas, responden memberikan nilai rata-rata sebesar 2.39 dan sub indikator keamanan sebesar 2.40 keduanya masuk kategori cukup baik. Namun untuk sub indikator kenyamanan responden hanya memberikan nilai sebesar 1,71 atau masuk dalam kategori kurang baik.

Pada sub indikator keselamatan (*safety*), sebagian responden memberikan tanggapan bahwa fasilitas umum di Kota Serang secara umum sudah cukup baik namun di beberapa fasilitas publik masih dalam kondisi membahayakan pengguna. Hal ini terlihat pada fasilitas JPO yang berada di area Alun-alun Kota Serang yang menghubungkan dengan mall Ramayana dan JPO yang berada di di

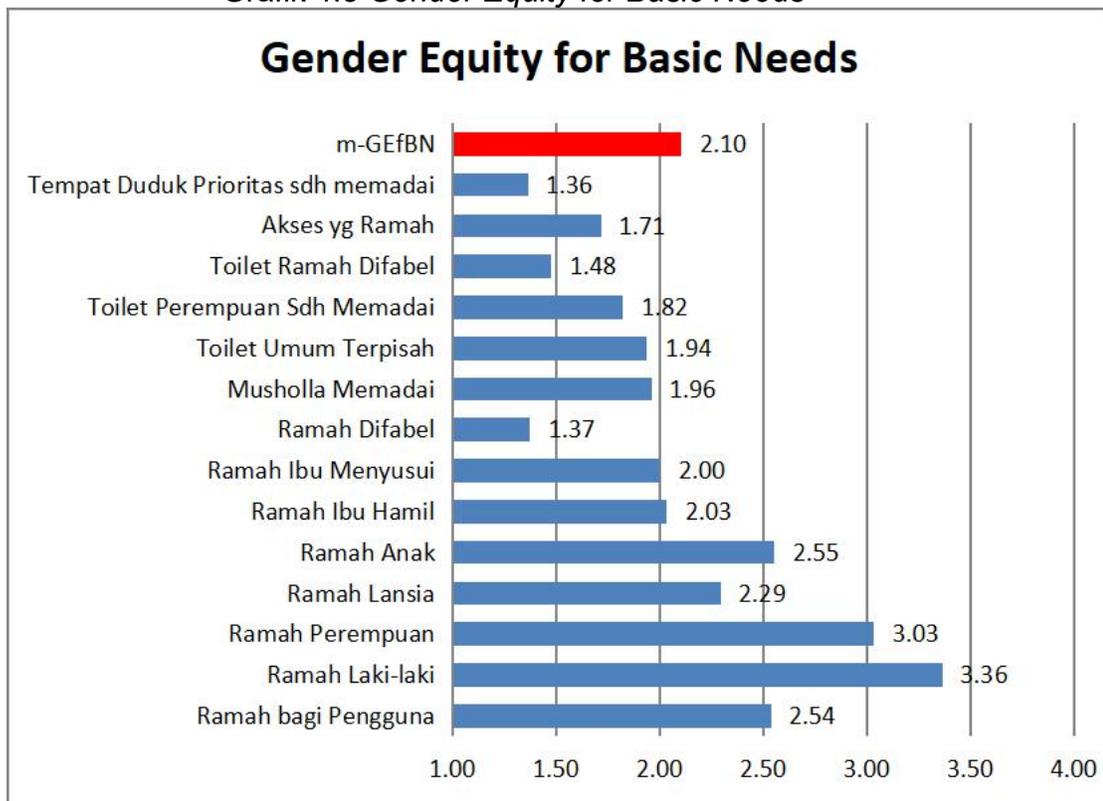
jalan Ahmad Yani yang menghubungkan Carefour dengan Mc Donal (Ciceri).

Kondisi JPO yang berkarat dan berlubang jelas sangat membahayakan pengguna fasilitas publik yang satu ini. Masyarakat terpaksa harus melewati jembatan ini, karena tidak memungkinkan melewati jalan bawah karena medan jalan yang sangat tinggi. Demikian juga dengan kondisi Trotoar yang dirasakan oleh masyarakat, karena di sepanjang jalan Ahmad Yani menjadi licin ketika hujan tiba.

2. Indikator *Gender Equity for Basic Need*

Indikator ini menjelaskan bagaimana fasilitas publik memenuhi kesetaraan gender pada kebutuhan dasar bagi pengguna fasilitas. Misalnya apakah fasilitas publik yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk semua kelompok masyarakat (laki-laki, perempuan, lansia, anak dan difabel). Jawaban atas pertanyaan ini dapat dijelaskan pada grafik berikut ini:

Grafik 4.3 Gender Equity for Basic Needs



Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018

Grafik di atas dapat dilihat secara umum (rata-rata) fasilitas publik ramah terhadap kebutuhan pengguna atau tidak. Berdasarkan temuan lapangan bahwa responden merasa cukup baik karena rata-rata yang didapat sebesar 2,10. Untuk pertanyaan apakah fasilitas publik ramah bagi pengguna (semua kelompok pengguna) maka nilai yang diberikan sebesar 2,54 atau masuk ke dalam kategori baik. Fasilitas publik di Kota Serang dinilai sangat ramah terhadap kebutuhan dasar untuk laki laki yaitu sebesar 3.36 (sangat baik).

Kemudian rata-rata fasilitas publik juga sudah ramah bagi kaum perempuan dan anak yaitu masing-masing sebesar 3.03 (baik) dan 2.55 (baik).

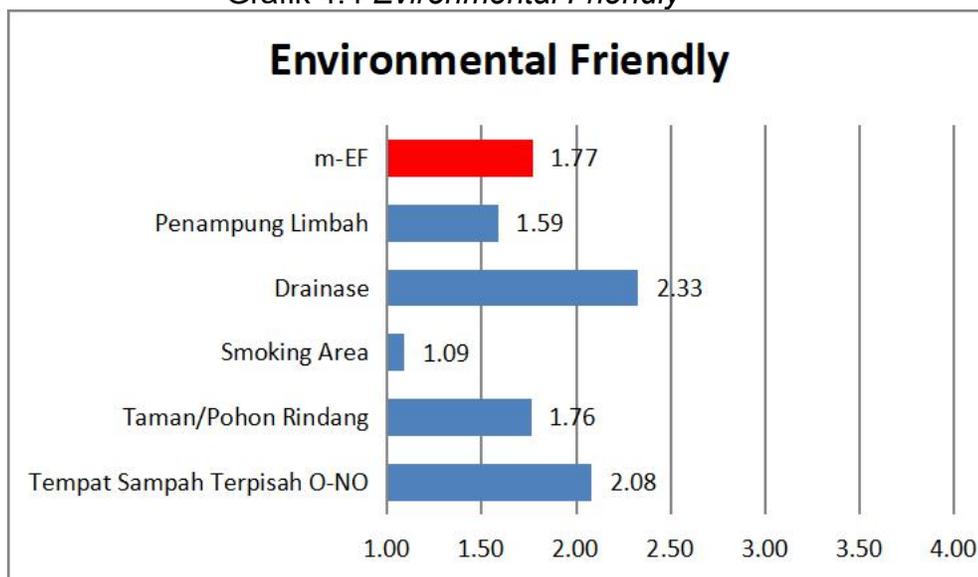
Trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat parkir dan tempat PKL dapat menyulitkan penyandang tunanetra untuk menggunakan fasilitas ini. Kondisi trotoar yang demikian tidak hanya menyulitkan difabel tetapi juga dapat menyulitkan pengguna trotoar yang lainnya.

3. Indikator *Environmental Friendly*

Indikator ini menjelaskan bagaimana fasilitas publik yang ramah terhadap lingkungan, digambarkan pada ketersediaan sarana tempat sampah yang terpilah, ketersediaan taman atau

pohon yang rindang, lokasi smoking area, drainase berfungsi dengan baik, dan terdapat penampungan limbah. Berikut ini dapat dijelaskan hasil penelitiannya.

Grafik 4.4 *Environmental Friendly*



Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh informasi bahwa secara umum responden menilai bahwa fasilitas publik di Kota Serang berdasarkan indikator ramah lingkungan masih masuk kategori cukup baik. Namun demikian nilai rata-rata yang diberikan sangat mengkhawatirkan yaitu diangka 1,77.

Ketika survey dilakukan dapat ditemukan bahwa memang tempat

sampah yang disediakan sudah terpilah antara sampah organik dan non organik, sehingga responden juga memberikan nilai sebesar 2,03 atau masuk kategori cukup baik. Kemudian untuk indikator drainase di Kota Serang, responden memberikan penilaian sebesar 2.33 atau masuk kategori cukup baik. Namun terdapat beberapa sub indikator yang masih dinilai kurang baik oleh responden diantaranya adanya taman

atau pohon yang rindang, pengolahan limbah dan *smooking area*.

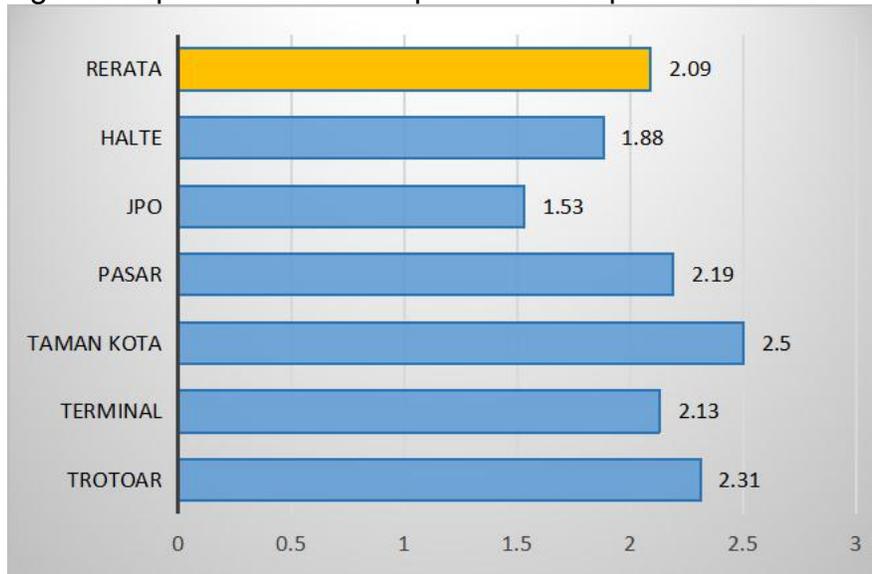
Fasilitas taman dan pohon rindang dinilai masih belum mencukupi pada fasilitas umum terutama fasilitas yang berada di terminal, trotoar, JPO dan pasar. Fasilitas yang dimaksud belum memenuhi standar keindahan dan ramah lingkungan. Pada Fasilitas pasar misalnya, tidak ditemukan pohon rindang maupun taman yang bias membuat nyaman bagi semua pengunjung. Demikian juga dengan terminal, tidak dijumpai adanya pohon rindang walaupun ada pohon rindang yang berada diluar terminal. Namun demikian telah diupayakan penyediaan taman disepanjang gerbang terminal.

Fasilitas *smooking area* belum dijumpai di setiap fasilitas publik yang menjadi lokasi penelitian ini. Di terminal misalnya pengunjung sangat bebas merokok tanpa memperdulikan apakah

ada anak kecil, perempuan atau orang lain disekitarnya yang tidak merokok. Di pasar pun demikian, tidak disediakan fasilitas *smooking area*, kondisi yang panas tanpa pohon rindang/taman ditambah dengan orang yang bebas merokok menambah penguatan bahwa pasar di Wilayah Kota Serang tidak responsive gender. Hal ini juga terjadi pada fasilitas publik lainnya.

Tingkat responsifitas gender pada fasilitas umum di Serang secara umum masuk ke dalam kategori cukup baik yaitu sebesar 2.09. Setelah dipaparkan secara detail pada halaman sebelumnya, maka secara implisit dapat dipaparkan berapa besar tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik dapat dijustifikasi berdasarkan lokasi penelitian. Berikut paparan justifikasi tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik yang dimaksudkan.

Grafik 4.5
Tingkat Responsifitas Gender pada fasilitas publik di Kota Serang



Sumber: Data Penelitian Diolah, 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa fasilitas publik yang dianggap paling responsif gender adalah fasilitas taman kota dengan nilai sebesar 2,50 atau masuk ke dalam kategori baik. Kemudian untuk Halte, Pasar, Terminal dan Trotoar masuk ke dalam kategori cukup baik. dan kemudian pada fasilitas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dianggap belum responsive gender, oleh karena itu diberi nilai sebesar 1,53 (kurang baik). Kondisi JPO yang rusak dan tak terawat dapat membahayakan siapapun yang melintas. Berdasarkan hasil temuan di atas maka sangat diperlukan perhatian perhatian dari pemerintah daerah setempat untuk

memperbaiki kinerjanya, terutama pada penyediaan fasilitas publik di wilayah Kota Serang.

PENUTUP

Tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik adalah sebesar 2,09 termasuk kategori sedang. Dari empat indikator tersebut, pada indikator *universal utilization* tingkat responsifitas nya sebesar 2,30, *Safety, Security dan Convenience* sebesar 2,17, *Gender for basic need* tingkat responsifitas nya 2,10 dan *Environmental Friendly* memperoleh nilai 1,77 kategori rendah. Sementara itu tingkat responsifitas pada setiap objek yang diteliti diperoleh hasil

Responsifitas pada Trotoar jalan adalah 2,31 kategori sedang, Terminal sebesar 2,13, Halte sebesar 1,88, JPO sebesar 1,53, Pasar 2,19, Terminal 2,13 dan Taman Kota sebesar 2,5. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat responsifitas gender pada fasilitas publik, masih

DAFTAR PUSTAKA

Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Naqiyah, Najlah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing

Alhabsyi, A. L. 2016. *Gender Analysis Pathway (GAP) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Neglasari Kota Tangerang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Arkaniyati. 2012. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Usaha Tani Bawang Merah, Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa*

Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.